

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung - jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## B. TUPOKSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Fungsi Kepala Dinas Dikbud

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan dan Kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan dan Kebudayaan
- c. Pelaksanaan koordinasi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan dan Kebudayaan
- d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan dan Kebudayaan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi tugas perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian serta penyelenggaraan tugas pembantuan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Fungsi Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan dan anggaran dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Menyusun dan mengelola data dan informasi dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dibidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Menyusun bahan rancangan peraturan perundang – undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan
- f. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Mengelola kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Memfasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas – tugas pembantuan lainnya
- i. Menkoordinasikan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan
- j. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dasar, pendidikan nonfromal, dan kebudayaan
- k. Menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan

- l. Mengelola barang milik daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian; mempunyai tugas melaksanakan urusan pendistribusian dan kearsipan surat, penggandaan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor maupun kegiatan keprotokoleran Dinas sesuai kebijakan Kepala Dinas
  - b. Sub bagian keuangan ; mempunyai tugas menyusun perencanaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban laporan keuangan.
  - c. Sub bagian Program dan Pelaporan ; mempunyai tugas menyusun perencanaan program dinas, dokumentasi, kepustakaan, penyajian data dan informasi, dan pelaporan serta perencanaan anggaran
3. Bidang Pembinaan SD

Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pendidikan dasar

Fungsi Kepala Bidang Pembinaan SD

- a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dbidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
- b. Membina pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum, dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
- c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar
- d. Menyusun bahan penerbitan isin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar
- e. Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar

- f. Menyiapkan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
- h. Membuat laporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
- i. Meyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 4. Bidang Pembinaan SMP

Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah pertama

Fungsi Kepala Bidang Pembinaan SMP

- a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta Penyusunan kebijaksanaan teknis bidang Pembinaan SMP
- b. Membina pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama
- c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama
- d. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama
- e. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama

- g. Membuat laporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama
  - h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
5. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal
- Bidang Pembinaan PAUD dan pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
- Fungsi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
- a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
  - b. Membina pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
  - c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal
  - d. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
  - e. Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
  - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
  - g. Menyusun laporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
  - h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

## 6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan dibidang kebudayaan  
Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan

- a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian
- b. Menyusun bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian
- c. Menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah
- d. Menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah
- e. Menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten
- f. Menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
- g. Menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten
- h. Menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya
- i. Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten
- j. Menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten
- k. Menyusun bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, peran pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian
- l. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian

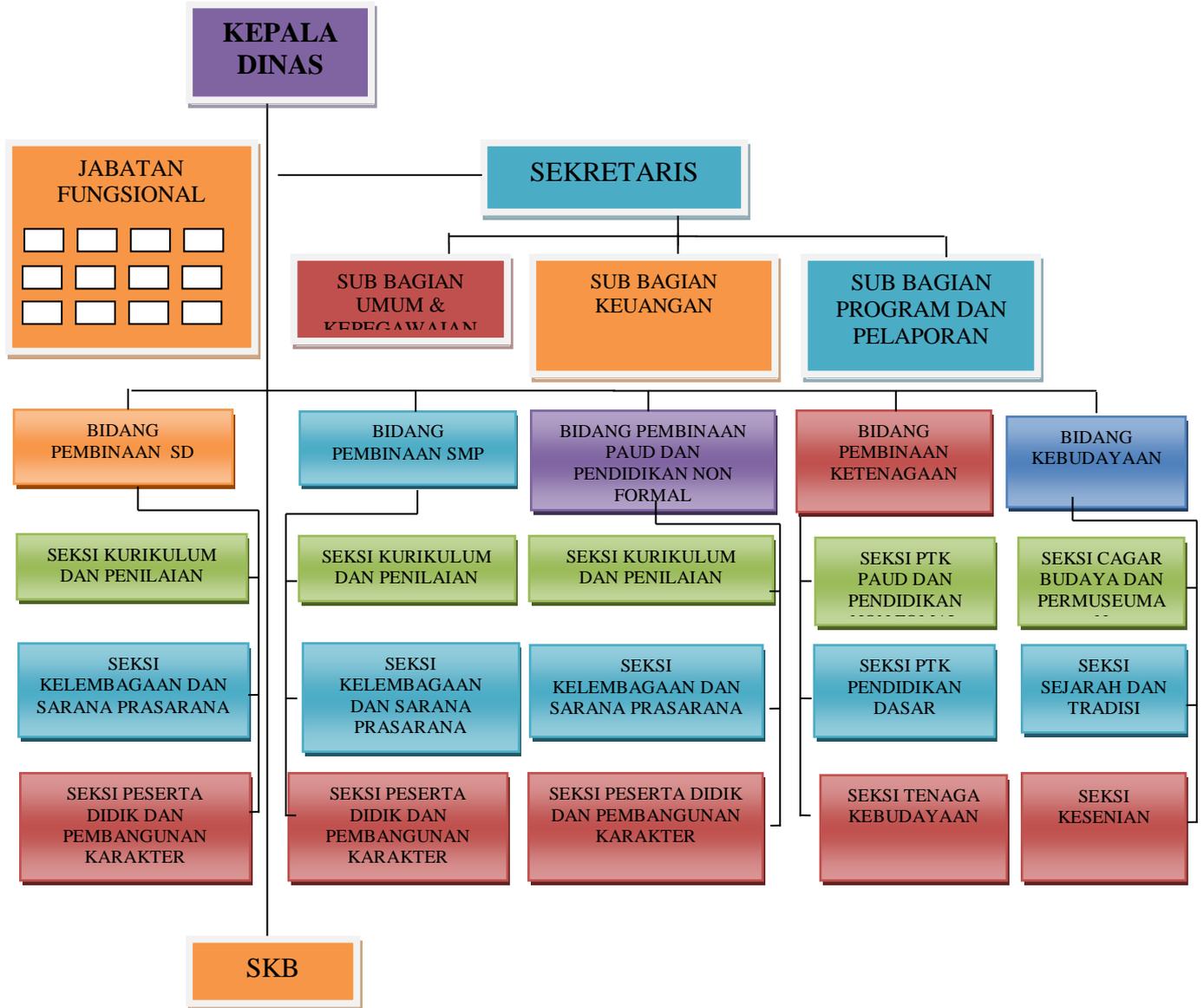
- m. Membuat laporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dilengkapi dan dibantu dengan masing-masing 3 (tiga) kepala Seksi:

- Kepala Bidang Pembinaan SD, dibantu oleh:
  - o Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - o Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - o Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- Kepala Bidang Pembinaan SMP, dibantu oleh:
  - o Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - o Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - o Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal, dibantu oleh:
  - o Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - o Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - o Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, dibantu oleh:
  - o Kepala Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal
  - o Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar
  - o Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan
- Kepala Bidang Kebudayaan, dibantu oleh:
  - o Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
  - o Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
  - o Kepala Seksi Kesenian

### C. KONDISI PERSONIL DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**Tabel 1**  
Susunan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2018

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina TK.I	IV/b	3
3.	Pembina	IV/a	5
4.	Penata TK.I	III/d	10
5.	Penata	III/c	10
6.	Penata Muda TK.I	III/b	11
7.	Penata Muda	III/a	22
8.	Pengatur TK.I	II/d	3
9.	Pengatur	II/c	10
10.	Pengatur Muda TK.I	II/b	7
11.	Pengatur Muda	II/a	6
12.	Juru TK.I	I/d	-
13.	Juru	I/c	-
14.	Juru Muda TK.I	I/b	-
15.	Juru Muda	I/a	-
16.	Tenaga Honorer	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>88</b>

Tingkat Pendidikan pegawai dan staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Tingkat Pendidikan Pegawai dan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2018

No	Pangkat	PNS	NON PNS	Jumlah
1.	S3 (Doktor)	1	-	1
2.	S2 (Pasca sarjana)	6	-	6
3.	S1 (Sarjana)	54	45	99
4.	Diploma/Sarjana Muda	3	1	4
5.	SLTA/Sederajat	22	76	98
6.	SLTP/Sederajat	2	2	4
7.	SD/Sederajat		-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>88</b>	<b>124</b>	<b>212</b>

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

1. Kepala Dinas .....1 Orang
2. Sekretaris Dinas .....1 Orang  
Dibantu oleh :
  - Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD .....1 Orang
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ..... 1 Orang
  - Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan .....1 Orang
3. Kepala Bidang Pembinaan SD ..... Orang  
Dibantu Oleh :
  - Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian .....1 Orang
  - Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana .....1 Orang
  - Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter ..... Orang
4. Kepala Bidang Pembinaan SMP ..... 1 Orang  
Dibantu Oleh :
  - Kepala Seksi Kurikulum dan <sup>Penilaian</sup> .....1 Orang
  - Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana ....1 Orang
  - Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .....1 Orang
5. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal ..... Orang  
Dibantu Oleh :
  - Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian..... 1 Orang
  - Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana ..... 1 Orang
  - Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .....1 Orang
7. Kepala Bidang Ketenagaan .....1 Orang  
Dibantu Oleh :
  - Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal .....1 Orang
  - Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar .....1 Orang
  - Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan .....1 Orang
8. Kepala Bidang Kebudayaan .....1 Orang  
Dibantu Oleh :
  - Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman .....1 Orang

- Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi .....1 Orang
  - Kepala Seksi Kesenian .....1 Orang
8. Koordinator Pengawas .....1 Orang
- Dibantu Oleh :
- Pengawas SMP .....15 Orang
  - Pengawas TK,SD ..... 26 Orang

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

##### VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### A. VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng adalah

***“Pendidikan bermutu , berkarakter dan berkearifan lokal guna mendukung Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dibagian Sulawesi Selatan ”***

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) *Meningkatkan pemerataan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang bermutu menuju standar nasional pendidikan, termasuk pelayanan pembinaan kebudayaan*
- 2) *Meningkatkan kualitas proses pendidikan, termasuk pengembangan pendidikan karakter untuk pembentukan kepribadian.*
- 3) *Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, kreatif dan bertanggung jawab.*
- 4) *Pembinaan dan pelestarian kebudayaan untuk mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter.*

##### B. TUJUAN

Tujuan pengembangan pendidikan Kabupaten Bantaeng sejalan dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang difokuskan pada penguatan layanan pembangunan yang sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional 2014 yakni *terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia*

*cerdas dan komprehensif*. Untuk mencapai visi ini, Kementerian Pendidikan Nasional menekankan pada 5 (lima) misi yaitu (1) *Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan,* (2) *Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan,* (3) *Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan,* (4) *Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan,* dan (5) *Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.*

Tujuan yang ingin dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua Kecamatan
2. Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan.
4. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5. Tersedianya sistem tata kelola kelembagaan semua satuan pendidikan dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat.
6. Optimalisasi Pembinaan dan Pelestarian Kebudayaan untuk mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter.

### **C. SASARAN**

Untuk mengukur ketercapaian tujuan pengembangan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai hingga Tahun 2018. Mengacu pada rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 - 2018, sasaran yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yaitu :

- 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua Kecamatan

- 2) Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- 3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan.
- 4) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- 5) Tersedianya sistem tata kelola kelembagaan semua satuan pendidikan dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat.

Indikator Kinerja dan target kinerja untuk masing – masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut :

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR RENSTRA
Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	36,44	62,71
	2. Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 / D. IV	%	51,40	76,71
	3. Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	32,40	38,90
Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar yang berkualitas	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A	%	101,60	109,36
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A	%	79,80	106,73
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Paket B	%	99,96	86,95
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B	%	58,40	83,48
	5. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106,40	103,67
	6. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs			

	ke SMA/SMK/MA	%	113,70	0,00
	7. Guru Jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1 / D. IV	%	79,48	93,28
	8. Guru Sd/MI, SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	%	40,49	39,60
Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah yang berkualitas	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket	%	90,72	0,00
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	%	50,24	0,00
	3. Guru Jenjang Dikmen yang memenuhi kualifikasi S1 / D. IV	%	98,34	0,00
	4. Guru SMA/MA. SMK yang bersertifikat Pendidik	%	36,80	0,0
Meningkatkan kualitas / mutu layanan pendidikan	1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	6,73	0,52
	2. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	93,45
	3. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,61	0,99
	4. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	1,26	0,00
	5. Angka Putus Sekolah (Aps) SMA/SMK/MA	%	99,08	0,00
	6. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%		
Mewujudkan kesetaraan Dalam memperoleh layanan pendidikan	Penduduk yang berusia $\geq$ 15 tahun melek huruf ( tidak buta aksara )	%	82,53	94,16
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni	Nilai sejarah dan karya budaya yang diaktualisasikan kedalam masyarakat	%	100	47,78

## **SASARAN**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas

Sasaran dari setiap tujuan adalah sebagai berikut:

- a) Tersedia dan terjangkau layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua Kecamatan.

Indikator untuk mencapai sasaran di atas adalah:

- 1) Meningkatkan APK PAUD formal (TK/RA) dari 55,52% di akhir tahun 2016 menjadi 62,71 % di akhir tahun Tahun 2018
- 2) Meningkatkan layanan PAUD di semua desa dan kelurahan di 8 (delapan) kecamatan.
- 3) Meningkatkan angka kelayakan mengajar hingga 80% melalui peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dari Diploma ke jenjang Sarjana.

Tujuan 2 :

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar yang berkualitas

- a). Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Indikator untuk mencapai sasaran di atas adalah:

### **Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah**

- a) Mempertahankan APM SD/MI yang telah mencapai 106,73% pada awal tahun 2018
- b) Mempertahankan angka melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs dari 106,4 % pada tahun 2018, dari kondisi akhir Renstra 103,67%
- c) Meningkatkan pemerataan mutu ruang kelas SD/MI yang memiliki kondisi baik dari 66,01 % pada tahun Tahun 2018 menjadi 100%
- d) Menurunkan Angka Mengulang Kelas SD/MI, khususnya pada kelas awal

dari 9,06 % pada tahun 2015 menjadi 2,10% sampai tahun 2018.

- e) Memperbaiki rasio buku siswa per-mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pokok, menjadi 1 : 1 sampai tahun 2018
- f) Meningkatkan nilai UASBN rata-rata dari 6,49 menjadi 6,77 pada Tahun Tahun 2018
- g) Menurunkan angka putus sekolah 0,67 % ditahun 2015 menjadi 0,05%.
- h) Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik melalui sertifikasi guru dan pelayanan retrieval dengan memberikan bantuan beasiswa bagi guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### **Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah**

- a) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dari 86,95 % , yang diawal tahun Tahun 2018.
  - b) Meningkatkan pemerataan prasarana pendidikan (mutu ruang kelas ) yang memiliki kondisi baik menjadi 95%.
  - c) Memperbaiki rasio buku siswa SMP per mata pelajaran, khususnya untuk mata pelajaran pokok, menjadi 1 : 1 sampai tahun 2018.
  - d) Meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan persentase kelulusan menjadi 100%, dan peningkatan nilai rata-rata ujian nasional menjadi 7,55 sampai tahun 2018.
  - e) Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik melalui sertifikasi guru dan pelayanan retrieval dengan memberikan bantuan beasiswa bagi guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Indikator untuk mencapai sasaran di atas adalah:
- a) Meningkatkan angka literasi penduduk usia  $\geq 15$  tahun mencapai  $\geq 95\%$
  - b) Akreditasi program keahlian lembaga kursus dan pelatihan
  - c) Meningkatkan kompetensi lulusan program kecakapan hidup

- c) Tersedianya sistem tata kelola kelembagaan semua satuan pendidikan dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat.

Indikator untuk mencapai sasaran di atas adalah:

- a) Penerapan manajemen berbasis sekolah pada setiap jenis dan satuan pendidikan
  - b) Tersedianya informasi pendidikan yang memadai dan memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan pada setiap jenis dan satuan pendidikan.
  - c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, pembiayaan dan pengelolaan pendidikan pada setiap jenis dan satuan pendidikan.
  - d) Pemanfaatan alat teknologi Informasi dan Komunikasi, serta jaringan network dan pangkalan data dan informasi berbasis website berfungsi dengan baik.
  - e) Pengembangan kapasitas Komite sekolah dan Dewan pendidikan.
- d) Optimalisasi pembinaan kepemudaan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

Indikator untuk mencapai sasaran di atas adalah:

- a) Tersedianya gelanggang/balai remaja
- b) Tersedianya organisasi kepemudaan
- c) Terbinanya atlit berbakat dan berprestasi tingkat Kabupaten
- d) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dalam rangka menunjang peningkatan prestasi olahraga.

Indikator ketercapaian sasaran yang akan dicapai dalam kurun Tahun Tahun 2018 adalah:

- 1) Meningkatnya APK PAUD formal (TK/RA) dan non format (KB/SPS/TPA) menjadi 63,23.
- 2) Meningkatnya layanan PAUD di semua desa dan kelurahan di 8 (delapan)

kecamatan.

- 3) Meningkatnya APM SD/MI yang sudah mencapai 87,39 di tahun 2016 menjadi 106,73 diawal tahun 2018.
- 4) Meningkatnya angka melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs dari 95,19% menjadi 99% sampai Tahun 2018.
- 5) Meningkatnya pemerataan mutu ruang kelas SD/MI yang memiliki kondisi baik menjadi 90%
- 6) Menurunnya Angka Mengulang Kelas SD/MI, khususnya pada kelas awal dari 4,46 pada awal tahun 2018.
- 7) Memperbaiki rasio buku siswa per-mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pokok, menjadi 1 : 1 sampai tahun 2018
- 8) Meningkatnya nilai UASBN rata-rata dari 6,49 tahun 2015 menjadi 6,77
- 9) Menurunnya angka putus sekolah 1,27% menjadi 0,05%.
- 10) Mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, dari 87,51 pada tahun 2015
- 11) Meningkatkan angka melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada kecamatan terendah menjadi 72% sampai Tahun 2018.
- 12) Meningkatnya pemerataan prasarana pendidikan (mutu ruang kelas) SMP/MTs yang memiliki kondisi baik menjadi 95%.
- 13) Memperbaiki rasio buku siswa SMP per mata pelajaran, khususnya untuk mata pelajaran pokok, menjadi 1 : 1 sampai tahun 2018.
- 14) Meningkatnya mutu lulusan melalui peningkatan persentase kelulusan menjadi 100%, dan peningkatan nilai rata-rata ujian nasional menjadi 7,25 sampai tahun 2018.
- 15) Meningkatnya angka kelayakan mengajar melalui peningkatan kualifikasi mencapai 75%
- 16) Meningkatnya angka literasi penduduk usia  $\geq 15$  tahun mencapai  $\geq 95\%$
- 17) Penerapan manajemen berbasis sekolah pada setiap jenis dan satuan pendidikan
- 18) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, pembiayaan dan pengelolaan pendidikan pada setiap jenis dan satuan pendidikan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk masing – masing sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR RENSTRA
Tersedia dan Terjangkauannya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan	1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	36,44	71,37
	2. Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 / D. IV	%	51,40	81,67
	3. Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	32,40	40,25
Tersedia, terjangkauannya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A	%	101,60	143,40
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A	%	79,80	109,61
	b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Paket B	%	99,96	87,11
	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B	%	58,40	55,44
	d. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106,40	106,40
	e. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	113,70	0,00
	f. Guru Jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1 / D. IV	%	79,48	91,69
	g. Guru Sd/MI, SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	%	40,49	46,48
Tersedia dan terjangkauannya layanan pendidikan menengah yang berkualitas da relevan dengan memperhatikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket	%	90,72	0,00
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	%	50,24	0,00
	3. Guru Jenjang Dikmen yang	%		

inklusifitas baik Pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan	memenuhi kualifikasi S1 / D. IV		98,34	0,00
	4. Guru SMA/MA. SMK yang bersertifikat Pendidik	%	36,80	0,00
Meningkatkan kualitas / mutu layanan pendidikan	1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	6,73	0,50
	2. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
	3. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,61	1,00
	4. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	1,26	100
	5. Angka Putus Sekolah (Aps) SMA/SMK/MA	%	99,08	0,00
	6. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,08	0,00
Meningkatnya Angka literasi penduduk usia 15 tahun	Penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	82,53	95,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni	1. Pelaku, organisasi dan komunitas seni berkarya	%	100	47,78
	2. Nilai sejarah dan karya budaya diaktualisasikan kedalam masyarakat	%	100	
	3. Cagar budaya yang dilestarikan	%	100	

#### **PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

Berdasarkan visi, isi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program – program. Adapun Program – Program untuk mendukung masing – masing sasaran Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Tersedia dan Terjangkauanya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatkan kualitas / mutu layanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik
Meningkatnya Angka literasi penduduk usia 15 tahun	Program Pendidikan Non Formal
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> </ol>

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 dilakukan dengan mengacu pada Renstra, Rencana Kerja (Renja) 2018, IKU dan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan PK sebagai berikut :

**TABEL**  
**PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Tersedia dan Terjangkauanya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan	1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	71,37
	2. Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 / D. IV	%	81,67
	3. Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	40,25
Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	1. Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI Paket A	%	143,40
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket	%	109,61
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Paket B	%	87,11
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B	%	55,44
	5. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke Smp/MTs	%	106,40
	6. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	0,00
	7. Guru Jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1 / D. IV	%	91,69
	8. Guru Sd/MI, SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	%	46,48
Meningkatnya Angka literasi penduduk usia 15 tahun	Penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	95
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni	1. Pelaku, organisasi dan komunitas seni berkarya	%	40
	2. Nilai sejarah dan karya budaya diaktualisasikan kedalam masyarakat	%	85
	3. Cagar budaya yang dilestarikan	keg	16

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

### LAMPIRAN VI : INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANTAENG TAHUN 2018

Tahun Anggaran : 2018

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Rumus					Target	Realisasi	
						2014	2015	2016	2017	2018	2018	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	
1	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas.	1.1 Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua Kecamatan	1.1.1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ----- x 100 % Jumlah anak usia 4 - 6 tahun	52.78	64.10	55.52	62.71	71.37	62.71
			1.1.2	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV ----- x 100 % Jumlah Guru TK/RA	51.40	69.72	75.88	73.49	81.67	76.71
			1.1.3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	Jumlah guru bersertifikat pendidik ----- x 100 % Jumlah Guru TK/RA	32.40	35.02	31.47	46.40	40.25	38.90
2	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar yang berkualitas.	2.1 Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dengan	2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	Jumlah siswa dijenjang SD/MI/Paket A ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	101.60	120.89	110.60	110.57	143.40	109.36

			memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	2.1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	79.80	93.56	86.86	87.39	109.61	104.64
				2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah siswa usia dijenjang SMP/MTs/Paket B ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	99.96	94.03	87.51	85.78	87.11	86.95
				2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	58.40	57.04	50.99	47.90	55.44	84,53
				2.1.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	106.40	106.40	102.49	97.66	106.40	107.67
				2.1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	113.70	113.70	107.86	0.00	0.00	0.00
				2.1.7	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	Jumlah guru jenjang Dikdas berijasah kualifikasi S1/D-IV ----- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs	79.48	85.12	89.12	91.58	91.69	90.14
			2.1.8	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	%	Jumlah guru bersertifikat pendidik ----- x 100 %	40.49	43.26	42.56	42.98	46.48	39.60	

4	Meningkatkan kualitas/mutu layanan pendidikan	4.1	Meningkatnya kualitas/mutu layanan pendidikan	4.1.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	6.73	1.27	0.51	0.76	0.50	0.70
				4.1.2	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	100.00	96.85	95.49	93.89	100.00	91.23
				4.1.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	2.61	0.71	0.85	0.86	1.00	0.58
				4.1.4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	100.00	97.33	95.65	93.02	100.00	92.63
				4.1.5	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya	1.26	2.06	0.97	1.93	0.00	0.00

				4.1.6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	99.08	98.89	100.00	95.63	0.00	0.00
5	Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan	5.1	Meningkatnya Angka literasi penduduk usia > 15 Thn	5.1.1	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 th ke atas	82.53	0.00	95.80	90.87	95.00	94.16
6	Melestarikan cagar budaya secara berkelanjutan	6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku seni	6.1.1	Pelaku, organisasi dan komunitas seni berkarya	/000	Jumlah pelaku, organisasi dan komunitas seni yang berkarya ----- x 100 %	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	43.00
				6.1.2	Nilai sejarah dan karya budaya yang diaktualisasikan kedalam masyarakat	%	Jumlah nilai sejarah dan karya budaya yang diaktualisasikan kedalam masyarakat ----- x 100 % Jumlah penduduk produktif usia 20 tahun keatas	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	43,00
		6.3	Peningkatan pelestarian cagar budaya	6.1.3	caagar budaya yang dilestarikan	Keg	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 %	0	0	0	0	47,78	62,00
							Jumlah Total cagar budaya yang dilestarikan						

### **RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 217.995.047.546 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	194.173.089.646	187.052.263.908
2	Belanja Langsung	23.821.957.900	21.872.808.995

Alokasi Anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program – program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel

Alokasi Persasaran Tahun Anggaran 2018

LAMPIRAN II : PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG  
 Tahun Anggaran : 2018

No	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target Kinerja 2018		PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)				
					4	5						
1	2		3		4	5	6	7				
1	1.1	Tersedia dan terjangkau layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua Kecamatan	1.1.1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	71.37	%		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>				
							003	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	400,000,000			
							006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah	938,000,000			
						1.1.2	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81.67	%	042	Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah	186,000,000
					058					Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini	74,932,000	
					059					Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	685,923,000	
					1.1.3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	40.25	%	062	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	20,992,000	
									063	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	31,083,000	
									066	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	22,590,000	
		068	BOP Paud TK Negeri Pembina	48,000,000								

							069	BOP Paud TK Negeri Pertiwi Bisaappu	46,800,000
							070	BOP Paud TK Negeri Idhata	27,600,000
							072	BOP Paud TK Negeri Pertiwi Bantaeng	44,400,000
							073	BOP Paud TK Negeri Pertiwi Letta	46,200,000
							074	BOP Paud TK Negeri Pertiwi Banyorang	45,000,000
							075	BOP Paud TK Negeri Pertiwi Biangkeke	45,000,000
							076	BOP Paud TK Negeri Pertiwi Pullaweng	28,200,000
							077	BOP Paud TK Negeri Kartini	49,200,000
2	2.1	Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	143.40	%		<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	
							003	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1,232,183,000
							005	Pembangunan Labotarium dan Ruang Praktikum Sekolah	1,183,715,500
							012	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	745,556,000
							056	dan Rehabilitasi sedang/berat Sarana Air Bersih Sanitary SD	170,946,000
							057	dan Rehabilitasi sedang/berat Sarana Air Bersih Sanitary SMP	279,884,500
							059	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	122,094,000
							067	Penyelenggaraan Paket A setara SD	36,002,550
							068	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	31,590,000
							076	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	32,200,000

			2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87.11	%	502	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah SD	2,852,410,000
							503	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah SMP	1,237,894,750
							504	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD	1,106,113,000
							505	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP	128,254,000
			2.1.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106.40	%	508	Pengadaan Moubeler Sekolah SD	165,924,000
							511	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	227,390,000
			2.1.7	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91.69	%	512	Operasional BOS SD	279,476,750
							513	Operasional BOS SMP	827,474,850
							514	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	2,935,920,000
							515	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	398,474,500
			2.1.8	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	46.48	%	516	Pembinaan Minat, Bakat Kreativitas Siswa SD	309,430,500
							517	Pembinaan Minat, Bakat Kreativitas Siswa SMP	318,052,900
							518	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SD	50,940,000
							519	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan SMP	35,437,500
							520	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD	397,321,000
							521	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP	972,513,000

3	3.1	Meningkatnya kualitas/mutu layanan pendidikan	4.1.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.5	%		<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik</b>		
			4.1.2	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	%	001	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	19,070,500	
								002	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik	169,411,500
								003	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi	200,000,000
			4.1.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1	%	008	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	118,169,600	
								010	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidikan	118,636,500
			4.1.4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	%	011	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan tenaga Kependidikan	361,663,000	
			4.1.5	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0	%	012	Pengembangan Sistem penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	1,167,922,000	
								013	Pemberian Jasa kepada Tenaga Pendidik Non Formal	305,688,000
			4.1.6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	0	%		<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		
								007	Penerapan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan	159,540,500
								009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	59,526,500
			4	4.1	Meningkatnya Angka literasi penduduk usia > 15 Thn	5.1.1	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	95	%	
	002	Pemberian bantuan Operasional Pendidikan Non Formal				50,740,000				
	003	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Kelembagaan				257,851,000				

							005	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	53,940,000
							007	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	86,618,000
							011	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	22,420,000
							014	Pekan olahraga menyambut Hari Aksara Internasional	84,557,000
5	5.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku seni	6.1.1	Pelaku, organisasi dan komunitas seni berkarya	40	/1000		<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	
							001	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	146,068,500
	5.2	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan apresiasi tradisi	6.1.2	Nilai Sejarah dan karya budaya diaktualisasikan kedalam masyarakat				<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	
	5.3	Peningkatan pelestarian cagar budaya	6.1.3	Cagar budaya yang dilestarikan			005	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakal, Museum dan Peninggalan Bawa	87,896,250
							019	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	84,763,650
								<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	
							001	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	94,577,150
							004	Fasilitasi Pengembangan Keragaman Kebudayaan Daerah	86,253,450
							005	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	376,505,000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) )**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Bantaeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Pencapaian kinerja INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng. secara ringkas digambarkan sebagai berindikator Kinerja Utama (IKU)t:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	%	71,37	61,36	<b>85,97</b>
2.	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,67	90,14	<b>110,37</b>
3.	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	40,25	38,90	<b>96,66</b>
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	143,40	109,36	<b>76,26</b>
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	109,61	106,73	<b>97,37</b>
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	87,11	86,95	<b>99,81</b>
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	55,44	83,48	<b>150,57</b>

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106,40	103,67	<b>97,43</b>
9.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	0	0	<b>0</b>
10.	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,69	93,28	<b>101,73</b>
11.	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	%	46,48	39,60	<b>56,57</b>
12.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0	0	<b>0</b>
13.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0	0	<b>0</b>
14.	Guru jenjang Dikmen yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	0	0	<b>0</b>
15.	Guru SMA/MA, SMK yang bersertifikat Pendidik	%	0	0	<b>0</b>
16.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,50	0,52	<b>96,30</b>
17.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	93,45	<b>93,45</b>
18.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,00	0,99	<b>98,80</b>
19.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	91,80	<b>91,80</b>
20.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	95,00	94,16	<b>99,12</b>
21.	Pelaku, organisasi dan komunitas seni berkarya	%	40,00	43,00	<b>53,75</b>
22.	Nilai sejarah dan karya budaya yang diaktualisasikan kedalam masyarakat	%	90,00	62,00	<b>43,00</b>
23.	cagar budaya yang dilestarikan	%	47,78	43,00	<b>47,78</b>

Indikator Kinerja Utama (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 - 2018 sebanyak 23 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berIndikator Kinerja Utama (IKU) :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 23 Indikator Kinerja Utama (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)) di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 85 % persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 5% persen telah memenuhi kriteria memuaskan, 5 % persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, 5 % (persen) telah memenuhi kriteria kurang memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

#### **B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berIndikator Kinerja Utama (IKU)t:

#### **Sasaran 1 :**

**Tersedia dan Terjangkaunya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia sekolah di semua kecamatan .**

##### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berIndikator Kinerja Utama (IKU)tahun ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan	1.	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	71,37	62,71	<b>87,87</b>
	2.	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pendidikan	%	81,67	76,71	<b>93,93</b>
	3.	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	40,25	38,90	<b>96,66</b>
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>92,25</b>	

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, untuk indikator kinerja utama dan pertama (Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini), Prosentase pencapaian target sebesar 87,87 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 55,52 % maka terdapat kenaikan APK PAUD sebesar 32,35 %. Kenaikan APK disebabkan bertambahnya lembaga PAUD dengan jumlah peserta didik sebanyak 5316 pada PAUD Formal yang tersebar pada 3902 TK/RA dan 1414 orang PAUD Non formal (KB, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis). Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan** ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 92,25 persen.

- a. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2013	2014	2015	2016	2018
1.	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	36,44	52,78	64,10	55,52	62,71
2.	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	51,40	69,72	75,88	73,49	76,71
3.	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	32,40	35,02	31,47	46,40	38,90

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

**b. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi kinerja target jangka menengah</b>	<b>Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	%	71,37	62,71	<b>87,87</b>
2.	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,67	76,71	<b>93,93</b>
3.	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	%	40,25	38,90	96,64

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka terdapat 3 indikator yang telah mencapai target jangka menengah target tersebut dioptimalkan agar di Tahun 2018 (tahun terakhir periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng ) telah melampaui dari target yang ditetapkan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan / peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan** ini didukung dengan adanya program pendidikan gratis, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOP) bagi sekolah jenjang TK dan PAUD dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi siswa yang masuk kategori tidak mampu, fasilitasi bus sekolah bagi anak sekolah, serta terpenuhinya alokasi anggaran baik APBN maupun APBD dalam rangka menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini pelaksanaan kegiatan dijenjang Pendidikan PAUD .

Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melaksanakan beberapa kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai anggaran yang tersedia, sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik .
2. Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini
3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
6. BOP Paud TK Negeri Pembina
7. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Bisaappu
8. BOP Paud TK Negeri Idhata
9. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Bantaeng

10. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Letta
11. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Banyorang
12. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Biangkeke
13. BOP Paud TK Negeri Pertiwi Pullaweng
14. BOP Paud TK Negeri Kartini

Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih disebabkan pada dinamika penganggaran yang ada di Kabupaten Bantaeng, anggaran untuk perbaikan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Sarana dan Prasarana dan meubiler sekolah yang tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar dan waktu yang lama untuk menuntaskan, sehingga target ini memang tidak untuk pencapaian jangka pendek tetapi dibutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut.

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan** ini adalah sebesar Rp. 2.733.116.000 (anggaran pokok) dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 2.739.920.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.681.482 atau 98,71 persen. .

**e. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua kecamatan** ini adalah sebanyak 1 program dan 14 kegiatan.



**Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

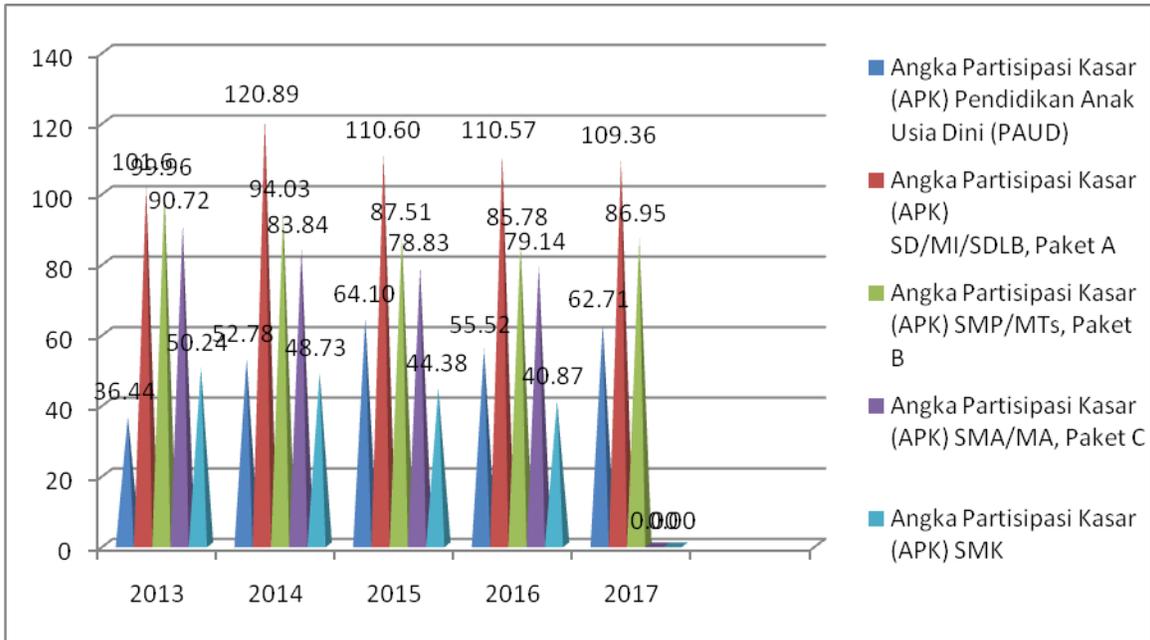
**b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berindikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A	%	143,40	109,36	76,26
	2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A	%	109,61	106,73	97,37
	3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Paket B	%	87,11	86,95	99,81
	4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B	%	55,44	83,48	150,57
	5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106,40	103,67	97,43
	6.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	00	00	00
	7.	Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memenuhi kualifikasi S1	%	91,69	93,28	101,73
	8.	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	%	46,48	39,60	56,57
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>97,33</b>	

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, untuk indikator kinerja pertama (APK SD/MI paket A) , Prosentase pencapaian target sebesar 76, 26 yakni APK SD/MI / Paket A telah mencapai 109,36 % dengan target 143,40 % atau sedikit menurun dibanding dengan tahun 2016 yang telah mencapai 110,57 %. APK yang telah melampaui target yang telah ditetapkan antara lain disebabkan adanya siswa diluar kelompok penduduk usia 7-12 tahun yang telah bersekolah pada jenjang SD/MI dan Paket A. Hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa pada jenjang SD dan jenjang MI yang belum berumur 7 tahun.

Indikator Angka melanjutkan juga cukup signifikan pencapaiannya pada tahun 2016. Angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs mencapai 103,67 % Sementara angka melanjutkan dari SMP/MTs , tampak bahwa jumlah siswa SMP/MTs lebih banyak dari lulusan SD/MI. Hal ini disebabkan beberapa sekolah menerima siswa baru yang berasal dari luar kabupaten, serta menerima siswa yang merupakan lulusan tahun – tahun sebelumnya



( Gambar : APK Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK Tahun 2013 – 2018 )

- c. Perbandingan kinerja antara target dan realisasi Tahun ini yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target Tahun ini	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A	%	143,40	109,36	76,26
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A	%	109,61	106,73	97,37
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Paket B	%	87,11	86,95	99,81
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B	%	55,44	83,48	150,57
5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106,40	103,67	97,43
6.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	00	00	00
7.	Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memenuhi kualifikasi S1	%	91,69	93,28	101,73
8.	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	%	46,48	39,60	56,57

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja tahun 2018 yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka terdapat 7 indikator yang telah mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target karena kurangnya tenaga pendidik guru SD/MI dan SMP/MTs yang bersertifikat pendidik, target tersebut dioptimalkan agar di Tahun 2018 (tahun terakhir periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng) telah melampaui dari target yang ditetapkan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan / peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini didukung dengan adanya program pendidikan gratis, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi siswa yang masuk kategori tidak mampu, fasilitasi bus sekolah bagi anak sekolah, serta terpenuhinya alokasi anggaran baik APBN maupun APBD untuk perbaikan sarana dan prasarana Sekolah yang sumber dananya baik dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng.

Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melaksanakan beberapa kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sebagai berIndikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
4. Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah
5. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
6. BOS Gratis SD
7. BOS Gratis SMP
8. Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah SD
9. Pengadaan Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa SD
10. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP
11. Pengadaan Meubiler Sekolah SD
12. Pengadaan Meubiler Sekolah SMP
13. Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini adalah sebesar Rp. 15.551.376.300,- untuk (Anggara Pokok) menjadi 16.077.198.300,- untuk anggaran Perubahan dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.104.178.488 atau 93,91 persen.

**f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Tersedia, terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun** ini adalah sebanyak 1 program dan 25 kegiatan.

Permasalahan:

- a. Sarana Prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama perpustakaan dan laboratorium serta meubiler masing kurang

Solusi:

- a. Adanya penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan laboratorium dan pengadaan meubiler sekolah

**SASARAN 3 :**

**Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan**

### Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis tidak dapat ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja Pertama (APK SMA/MA/SMK/Paket C) Porsentase pencapaiannya tidak dapat dicapai mengingat adanya pengalihan kewenangan untk jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi. secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berIndikator Kinerja Utama (IKU)t ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan dengan memperhatikan inklusifitas baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Paket C	%	0,00	00,	00
	2 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	%	0,00	0,00	00
	3 Guru Jenjang Dikmen yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	0,00	0,00	00
	4 Guru SMA/MA, SMK yang bersertifikat Pendidik	%	0,00	0,00	00

#### SASARAN 4 :

Meningkatnya kualitas / mutu layanan pendidikan

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berIndikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas / mutu layanan pendidikan pendidikan	1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,50	0,52	96,30
	2. Angka Kelulusan (AL) SD/MI)	%	100	93,45	93,45
	3. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,00	0,99	98,80

4.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	91,80	91,80
5.	Angka Putus (APS) SMA/SML/MA	%	00	00	00
6.	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	00	00	00
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>198,26</b>

Indikator kualitas / mutu layanan pendidikan ditunjukkan oleh nilai Angka Putus Sekolah (APTs) dan Angka Kelulusan (AL). APTs jenjang SD/MI mencapai 96,30 % dari target yang hanya 0,50 %. Angka Putus cukup tinggi pada jenjang SD yakni 105 orang siswa putus sekolah dari 20820 orang siswa dimana psada tahun sebelumnya sebesar 0,80 %. Sementara APTs untuk jenjang SMP/MTs mencapai 98,80 % dari target 100 % yang cukup tinggi terjadi pada jenjang SMP yakni 29 orang siswa putus sekolah dari 6115 orang siswa. Sedangkan Apts jenjang MTs yakni terdapat 68 orang putus sekolah dari 3715 orang siswa

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2013	2014	2015	2016	2018
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	6,73	1,27	0,51	0,76	0,52
2.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	96,85	95,49	93,89	93,45
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,61	0,71	0,85	0,86	0,99
4.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	97,33	95,65	93,02	91,80
5.	Angka Putus (APS) SMA/SML/MA	1,26	2,06	0,97	1,93	0,00
6.	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,08	98,89	100	95,63	0,00
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>98.89</b>	<b>126.40</b>	<b>137.07</b>	<b>186,82</b>

Berdasarkan dari tabel diatas secara umum dapat dikatakan bahwa terjadi fluktuasi mutu pada seluruh jenjang pendidikan, bahkan pada jenjang SMP/MTs cenderung meningkat pada 2 (dua) tahun terakhir, meskipun persentase kelulusan masih stabil mendekati angka 100%. Rendahnya sosialisasi dalam menyikapi perubahan kurikulum melihat kecenderungan rata – rata nilai ujian yang menurun pada jenjang SMP/MTs, maka perlu pembenahan proses pembelajaran hingga proses penilaian peserta didik terutama jika dikaitkan dengan potensi peserta didik. Jika nilai rata – rata ujian cenderung rendah, maka peluang untuk bersaing dengan lulusan SAM/MA dari daerah lain untuk masuk ke Perguruan Tinggi akan semakin berat, baik melalui jalur undangan maupun melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru. Perlu perhatian yang lebih besar terhadap siswa pada tingkat terakhir di SMP/MTs dan SMA/MA terutama kesiapan dalam menghadapi ujian nasional baik melalui optimalisasi pembelajaran maupun melalui proses remedial dan pengayaan mata pelajaran, khususnya mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melaksanakan beberapa kegiatan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berIndikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik
3. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidikan
5. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan tenaga Kependidikan

Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih disebabkan pada dinamika penganggaran yang ada di Kabupaten Bantaeng, anggaran untuk perbaikan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar dan waktu yang lama untuk menuntaskan, sehingga target ini memang tidak untuk pencapaian jangka pendek tetapi dibutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut.

**c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas / mutu layanan pendidikan** ini adalah sebesar Rp. 896.688.000 (anggaran pokok ) dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 975.538.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 576.937.600 atau 59,14 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja berarti tingkat efisiensi anggaran.



**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berIndikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Angka Literasi Penduduk Usia > 15 Tahun	1. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara )	%	95,00	94,00	99,12
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>99,12</b>

- Tingkat Melek Aksara usia 15 – 59 tahun

Program pemberantasan buta aksara adalah salah satu program pendidikan yang dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal yang merupakan bagian integral dari upaya

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan agar masyarakat yang masih menyandang status buta aksara memperoleh keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan berhitung dan mampu berbahasa Indonesia serta memperoleh keterampilan fungsional yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan dalam kehidupan sehari – hari

Buta Aksara di Kabupaten Bantaeng umur 15 – 59 tahun pada akhir tahun 2018 sejumlah ...orang. Angka tersebut diupayakan dapat dituntaskan. Program pemberantasan Buta Aksara melalui keaksaraan fungsional (KF) sangatlah diharapkan mampu menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantaeng. Harapan ini dapat menjadi kenyataan, jika program KF dapat dilakukan secara terus menerus serta berkelanjutan. Dari 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini capaian melampaui dari target yang telah ditetapkan. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Angka Literasi Penduduk Usia > 15 Tahun telah berhasil melampaui target.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melaksanakan beberapa kegiatan Program Pendidikan Non Formal sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berIndikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
2. Pemberian bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
3. Pengembangan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
4. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
5. Pekan olahraga menyambut Hari Aksara Internasional

Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih disebabkan pada dinamika penganggaran yang ada di Kabupaten Bantaeng, anggaran untuk perbaikan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar dan waktu yang lama untuk menuntaskan, sehingga target ini memang tidak untuk pencapaian jangka pendek tetapi dibutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut.

#### **b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Angka Literasi Penduduk Usia > 15 Tahun** ini adalah sebesar Rp. 621.987.500 ( anggaran pokok ) dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 737.086.500 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 657.156.500 atau 89,15 persen.

#### **c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Angka Literasi Penduduk Usia > 15 Tahun** ini adalah sebanyak 1 program dan 5 kegiatan.



**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelaku Seni**

#### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Optimalisasi pembinaan kesenian dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk pengembangan kesenian, diharapkan membangkitkan kesadaran pemuda akan potensi kewirausahaan yang mereka miliki, mendorong munculnya atau bangkitnya potensi dan peran aktif mendorong munculnya atau bangkitnya potensi dan peran aktif pengembangan kesenian serta mendorong kemandirian berkesenian bagi pemuda serta menciptakan lapangan pekerjaan sektor kesenian.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berIndikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelaku Seni	1. Pelaku, organisasi dan komunitas seni berkarya	Org	80,00	43,00	53,75
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>53,75</b>

Dari 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. .

**SASARAN 7 :****Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan apresiasi tradisi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan apresiasi tradisi	1. Nilai sejarah dan karya budaya diaktualisasikan kedalam masyarakat	Org	100,00	43,00	43,00
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>43,00</b>

**SASARAN 8 :****Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Pelestarian cagar budaya	1. Cagar budaya yang dilestarikan	%	90,00	43,00	47,78
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>47,78</b>

**REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran / Realisasi belanja langsung pada Tahun 2018 sebesar Rp. 21.872.808.195,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 24.698.021.900,- Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan sebesar 88,56 %.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

## **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKON / SUMBER LAIN DI LUAR APBD**

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengIndikator Kinerja Utama (IKU)ti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam pencapaian program wajib belajar 9 tahun tersebut. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yakni progam buku murah yang dimulai tahun 2008, tetap menjadi salah satu acuan utama program BOS Tahun 2018.

Dana alokasi khusus bidang pendidikan yang selanjutnya disebut DAK bidang pendidikan merupakan salah satu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Kabupaten Bantaeng untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar. DAK bidang pendidikan tahun Anggaran 2018 adalah

dana yang disiapkan pemerintah dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.

Alokasi DAK bidang pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK bidang pendidikan yang berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Selain DAK, dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke APBD melalui mekanisme transfer daerah adalah Pembayaran Tunjangan Profesi bagi guru PNS dan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2018.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat Tahun 2018 pada Kabupaten Bantaeng untuk jenjang Pendidikan Dasar dan menengah dialokasikan sebesar Rp.23.046.815.000,- untuk 147 sekolah Tingkat SD dan 34 sekolah pada jenjang SMP. Dana yang terserap hingga akhir tahun anggaran 2018 untuk 147 sekolah pada jenjang SD adalah Rp. 23.046.815.000,- 100 % dari alokasi awal. Serapan dana yang berbeda dengan alokasi dana awal tahun, karena adanya perubahan-perubahan jumlah siswa sehingga transfer dana pada tiap triwulan dilakukan penyesuaian.

Alokasi DAK bidang pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK bidang pendidikan yang berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Selain DAK, dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke APBD melalui mekanisme transfer daerah adalah Pembayaran Tunjangan Profesi bagi guru PNS dan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2018.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat Tahun 2018 pada Kabupaten Bantaeng untuk jenjang Pendidikan Dasar dan menengah dialokasikan sebesar Rp.23.046.815.000,- untuk 147 sekolah Tingkat SD dan 34 sekolah pada jenjang SMP. Dana yang terserap hingga akhir tahun anggaran 2018 untuk 147 sekolah pada jenjang SD adalah Rp. 23.046.815.000,- 100 % dari alokasi awal. Serapan dana yang berbeda dengan alokasi dana awal tahun, karena adanya perubahan-perubahan jumlah siswa sehingga transfer dana pada tiap triwulan dilakukan penyesuaian.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan Tahun 2018, diarahkan pada pembangunan sarana pendidikan SD dan SMP. Pada Tingkat SD, DAK bidang pendidikan Tahun 2018 digunakan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas sekolah SD, Pengadaan

Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa SD, Pengadaan Meubiler Sekolah SD, Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP, pengadaan meubeler sekolah SMP, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP

Alokasi DAK bidang pendidikan pada jenjang SD dan SMP Tahun 2018 adalah Rp. 5.302.162.600,-. Dana yang sudah terserap hingga akhir tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 4.592.132.823,- atau 87,19%.

Program Subsidi Guru Tahun 2018 berupa Tunjangan Profesi, Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD, Tunjangan Khusus, yang dananya berasal dari dana transfer pusat ke daerah.

Dana Tunjangan Profesi Tahun 2018 bagi guru dan pengawas yang telah lulus sertifikasi yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah dialokasikan sebesar Rp. 59.402.724.010 ( Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah ) ,- dan Silpa tahun 2016 sebesar Rp. 2.789.960.740,-. Tunjangan profesi dibayarkan secara Triwulan dengan serapan hingga akhir Desember 2018 (Triwulan IV) sebesar Rp. 59.608.493.120,- atau 82,31%, sisa anggaran tahun 2018 Rp. 2.584.191.630,-. Selain melalui mekanisme transfer daerah, bagi sebagian guru PNS dan guru non PNS serta guru SLB yang berjumlah 99 orang, dananya dibayarkan melalui dana APBN dengan mekanisme transfer langsung dari pusat (Direktorat PAUD, SD dan SMP ) langsung ke masing-masing rekening guru.

Dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum lulus sertifikasi yang berasal dari APBN dialokasikan sebesar Rp. 250.000/bulan,- atau total untuk tahun 2018 sebesar Rp. 92.750.000,-. Tunjangan tersebut telah dibayarkan dari Triwulan pertama (Januari – Maret) hingga Triwulan IV (Oktober-Desember) bagi 371 orang guru PNSD.

## BAB IV

### PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu Tahun 2018 telah melaksanakan dan merampungkan kegiatan yang telah direncanakan. Dari Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, nampak bahwa rata - rata pencapaian sasaran pada tahun ini adalah 88,56% dari 100% yang direncanakan.

Namun demikian masih juga terdapat sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya. Ini terutama disebabkan karena masih terdapatnya kegiatan - kegiatan yang belum memperlihatkan hasil dan manfaat yang maksimal, dengan pencapaian indicator outputnya keseluruhan sebesar 83,31 % pada urusan pendidikan dan 83,57 % pada urusan Kebudayaan.

Sehubungan dengan itu, maka pada tahun berikutnya diharapkan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari sejumlah kegiatan perlu terus dipantau dan dievaluasi agar ketiga indicator penilaian dapat lebih meningkat lagi, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng di masa-masa mendatang.

Bantaeng, 27 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Dr.Ir.H.ANDI AKIL RESSA,M.BA,MM**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19631019 198903 1 018